



Miskin Kok Boros!

The World Summit on the Information Society (WSIS) di Genewa baru saja usai. Negara kaya dan miskin, maju dan berkembang, sepakat meneriakkan kebutuhan TI di masa depan. Negara miskin berharap TI akan mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Negara kaya berharap TI makin menjadikan mereka tetap semakin kaya. *"Digital and knowledge divide"* menjadikan isu utama dalam deklarasi acara ini, tapi mudah-mudahan bukan sekadar pemantas, atau pancingan agar negara-negara miskin juga bersemangat menerapkan TI sesegera mungkin.

Negara-negara kaya produsen perangkat kebutuhan TI tentu saja senang dan mendukung tren ini. Tanpa disadari hal ini akan memungkinkan suatu bentuk ketergantungan baru negara berkembang kepada negara produsen perangkat TI. Perusahaan-perusahaan besar akan mendekati badan donor, sehingga negara miskin akan membeli produk mereka dalam upaya proyek yang

didanai negara donor tersebut untuk mengejar ketinggalan TI.

Proyek-proyek pemerintah diadakan (atau diada-adakan) dengan justifikasi mengejar ketinggalan penerapan TI.

Komputer model terbaru dan

perangkat lunak versi terbaru juga dibeli. Tidak peduli kalau menggunakan pinjaman dari negara donor. Negara donor juga bersemangat memberikan saran yang *"setengah memaksa"* untuk menerapkan solusi yang mahal, yang penting berasal dari negara donor tersebut. Secara tidak sadar, banyak negara miskin atau berkembang seperti Indonesia yang mulai terjebak ke dalam ketergantungan baru. Jangan-jangan semangat memanfaatkan TI malah makin memperlebar jurang antara negara kaya dan miskin.

Beberapa negara menyadari bahwa keterlambatan mereka dalam mengadopsi TI juga akibat keterbatasan kemampuan membeli perangkat lunak. Oleh sebab itu, negara seperti Brazil mendeklarasikan tentang pentingnya perangkat lunak bebas (*free software*) dan mewajibkan penggunaannya di pemerintahan. Sedangkan delegasi USA menolak hal tersebut. Tidak heran karena ada isu bahwa Microsoft menyumbang dana kampanye Presiden **Bush**. Akhirnya WSIS gagal mendeklarasikan pentingnya perangkat lunak bebas bagi negara berkembang, untuk mengatasi *digital divide*. Persaingan antara pendukung perangkat lunak bebas dan

produsen perangkat lunak *proprietary* cukup seru di WSIS ini.

Bagaimana Indonesia? Menkominfo dan stafnya tampaknya masih bingung dan cenderung menghindari isu ini. Tampaknya Indonesia tidak bisa terlepas dari ketergantungan dan dikte (secara langsung atau tak langsung) dari negara donor. Pembelian PC yang dibundel dengan sistem operasi tertentu tidak bisa ditolak. Dengan alasan HaKI, ribuan komputer yang dibeli untuk proyek pemerintah dibundel dengan sistem operasi tertentu. Sehingga seakan-akan wajib membayar *"pajak Sistem Operasi tertentu"*. Bahkan untuk pengadaan beribu-ribu perangkat keras komputer PEMILU 2004 kita tak mampu menolak agar tanpa disertai sistem operasi tertentu. Ketidakmampuan menolak ini menggambarkan ketergantungan kita. Pertimbangan jangka panjang belum lah menonjol dalam pengambilan keputusan implementasi TI di negara tercinta ini.

...ribuan komputer yang dibeli untuk proyek pemerintah dibundel dengan sistem operasi tertentu.

Seperti yang ditekankan oleh **Neville Holmes** dalam artikelnya *"The Digital Divide, the UN, and the Computing Profession,"* di IEEE Computer, Desember 2003, TI sendiri jangan hanya dianggap bisa memecahkan masalah, tetapi

juga menimbulkan masalah bagi negara berkembang. Dia juga menekankan bahwa pihak-pihak tertentu menggunakan kecenderungan trend TI ini untuk menciptakan monopoli dan ketergantungan baru.

Lihat langkah Israel yang menghentikan pembelian perangkat lunak Microsoft dan memanfaatkan OpenOffice, Korsel yang mendorong penggunaan Office lokal. Malaysia, Swedia, Afrika Selatan, dan beberapa negara EU telah mengarahkan pemanfaatan TI dengan perangkat lunak *open source*. Jerman dan Prancis bahkan telah secara aktif mengeluarkan seruan serta panduan untuk melakukan migrasi ke perangkat lunak open source. Bila negara-negara yang lebih kaya dari Indonesia memperhitungkan open source dengan alasan ekonomi, mengapa Indonesia masih belum memikirkannya, dan bahkan terkesan bingung di antara konflik kepentingan negara donor. Mungkin ungkapan *"Miskin kok Boros"* agak cocok dengan kondisi pemilihan solusi TI di Indonesia. Karena kita begitu *"jor-joran"* dalam membeli perangkat keras dan lunak. ♪